

Melampaui sekat ideologi: Menakar ulang identitas nasional dalam tinjauan kritik Marxis

Bagas Bintang Permadi

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110001@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Realitas; ideologi; pancasila; marxisme; materialisme.

Keywords:

Reality; ideology; pancasila; marxism; materialism.

ABSTRAK

Identitas Nasional kerap kali dibangun sebagai alat tunggal yang meromantisasi dengan sifat statisnya, yang bertujuan untuk mempersatukan keberagaman bangsa. Namun di era globalisasi ini, dimana keadaan sarat akan ketimpangan sosial dan ekonomi, identitas tersebut sering berbenturan dengan realitas kehidupan yang terbentuk atas kepentingan strata dan kelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah kembali konsep identitas nasional Indonesia

dengan sudut pandang kritik Marxis untuk melihat jarak antara struktur kelas dengan faktor ekonomi dalam mempengaruhi kekuatan identitas bangsa. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan kritik dialektis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas nasional sering kali berfungsi sebagai "kesadaran palsu" yang mengaburkan kerancuan kelas didalam masyarakat. Meskipun seperti itu, banyak ditemukan bahwa Indonesia memiliki perpaduan yang unik, yaitu nilai-nilai keadilan sosial (inti ajaran Marxis) telah diaplikasikan ke dalam sila kelima Pancasila. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk melampaui sekat ideologi, identitas nasional bukan hanya dipahami sebagai simbol budaya, namun harus diwujudkan dalam keadilan yang berdampak nyata agar identitas tersebut memiliki makna bagi seluruh lapisan sosial.

ABSTRACT

National identity is often constructed as a single tool that romanticizes its static nature, aiming to unite the nation's diversity. However, in this era of globalization, where conditions are rife with social and economic inequality, this identity often clashes with the realities of life that are shaped by strata and class interests. This study aims to identify and re-examine the concept of Indonesian national identity from a Marxist critical perspective to see the distance between class structure and economic factors in influencing the strength of national identity. The method used is qualitative with a literature study approach and dialectical criticism. The results of the study indicate that national identity often functions as a "false consciousness" that obscures class confusion within society. Despite this, many found that Indonesia has a unique blend, namely the values of social justice (the core of Marxist teachings) have been applied to the fifth principle of Pancasila. This study concludes that to transcend ideological barriers, national identity is not only understood as a cultural symbol, but must be realized in justice that has a real impact so that the identity has meaning for all social levels.

Pendahuluan

Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa yang terbentuk melalui proses sejarah, budaya, bahasa, nilai, dan pengalaman kolektif masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional berakar pada semangat persatuan di tengah keberagaman



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

suku, agama, ras, dan budaya yang dipersatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dasar identitas nasional Indonesia juga tercermin dalam Pancasila sebagai ideologi negara yang memuat nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Selain itu, identitas nasional tidak hanya bersifat simbolis seperti bahasa dan lambang negara, tetapi juga tercermin dalam pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, identitas nasional menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang terus berkembang (Faslah, 2024).

Dalam perspektif Islam, identitas nasional dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai keislaman karena Islam mengajarkan pentingnya persaudaraan, keadilan, dan persatuan umat manusia. Islam tidak memandang keberagaman sebagai ancaman, melainkan sebagai sunnatullah yang harus dihormati dan dijaga. Nilai-nilai seperti toleransi (tasamuh), tolong-menolong (ta'awun), dan cinta tanah air dapat menjadi penguat identitas nasional dalam kehidupan bermasyarakat. Sejarah juga menunjukkan bahwa para ulama dan tokoh Islam di Indonesia memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan karakter bangsa. Oleh sebab itu, identitas nasional yang berlandaskan nilai keislaman mampu menciptakan masyarakat yang religius, harmonis, dan tetap menjunjung tinggi persatuan bangsa (Tharaba, 2019).

Kebaikan Islam terhadap identitas nasional juga terlihat dalam ajarannya yang menekankan akhlak mulia dan tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kedamaian, menghormati pemimpin, serta mencintai lingkungan dan masyarakat tempat mereka hidup. Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam dapat menjadi pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa yang adil dan bermartabat. Selain itu, Islam mendorong umatnya untuk berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, yang semuanya berperan penting dalam memperkuat identitas nasional. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa, identitas nasional tidak hanya menjadi simbol persatuan, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang beretika, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Zainuddin et al., 2021).

Identitas nasional merupakan alat pembeda yang secara umum dipahami sebagai jati diri, karakteristik unik, atau tanda pengenal yang melekat pada suatu bangsa sehingga membedakannya dengan bangsa lain (Smith, 1991). Jika dilihat dari bahasa, istilah ini terbentuk dari kata "identitas" yang merujuk pada ciri khas atau pembeda, dan "nasional" yang merujuk pada kelompok besar yang diikat oleh kesamaan fisik, cita-cita, dan tujuan. Identitas ini tidak lahir secara instan, melainkan terbentuk melalui proses historis yang panjang, interaksi sosial, serta kesepakatan kolektif masyarakat yang mendiaminya. Dalam konteks modern, ia berfungsi sebagai fondasi utama eksistensi sebuah negara-bangsa di panggung global.

Secara mendalam, identitas nasional bukanlah entitas yang statis, melainkan sebuah konstruksi sosial yang dinamis dan terus bernegosiasi dengan perkembangan zaman (Anderson, 2006). Karakter kolektif ini terbentuk dari perpaduan unsur-unsur primordial seperti suku bangsa, ras, agama, dan bahasa, dengan unsur-unsur kultural serta eksistensial seperti sejarah bersama, penderitaan masa lalu (kolektif), dan institusi

politik. Ketika kelompok-kelompok primordial ini sepakat untuk meleburkan diri ke dalam satu payung politis, mereka menciptakan sebuah ikatan baru yang melampaui sekat-sekat perbedaan asal-usul mereka demi tujuan masa depan yang sama.

Dari perspektif sosiologis dan antropologis, identitas nasional berfungsi sebagai alat integrasi sekaligus pembatas (*boundary-making*) yang mempertegas konsep "kita" (*in-group*) dan "mereka" (*out-group*) (Billig, 1995). Melalui simbol-simbol nasional, ritual kenegaraan, dan narasi sejarah yang direproduksi secara konstan, individu di dalam negara merasakan ikatan emosional dan solidaritas organik dengan jutaan orang lain yang bahkan belum pernah mereka temui. Fenomena kebangsaan ini dikukuhkan melalui praktik keseharian yang sering kali tidak disadari, seperti penggunaan bahasa nasional secara formal, penghormatan bendera, hingga partisipasi dalam perayaan hari kemerdekaan.

Konstruksi identitas ini secara teoretis dapat dipetakan ke dalam dua bentuk utama, yaitu identitas kultural (*cultural identity*) yang berbasis pada ikatan etno-kultural, dan identitas politik (*civic identity*) yang berbasis pada kewarganegaraan serta kepatuhan hukum (Kymlicka, 1995). Identitas kultural biasanya bersumber dari nilai-nilai luhur adat istiadat, kearifan lokal, dan agama yang mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun. Sementara itu, identitas politik diwujudkan melalui adopsi sistem demokrasi, konstitusi negara, ideologi resmi, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang setara bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang suku dan rasnya.

Dalam perkembangannya, identitas nasional memegang peran krusial dalam memperkuat pertahanan non-militer suatu negara melalui pembentukan karakter dan jati diri bangsa (Guibernau, 2007). Ketika sebuah bangsa memiliki identitas yang solid, masyarakatnya cenderung memiliki daya tangkal yang kuat terhadap penetrasi ideologi asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai fundamental lokal. Kepercayaan diri kultural ini memicu lahirnya rasa nasionalisme yang sehat, di mana warga negara secara sukarela berkontribusi dalam pembangunan, menjaga stabilitas nasional, dan mempertahankan kedaulatan wilayahnya dari berbagai ancaman disintegrasi.

Namun, di era kontemporer, eksistensi identitas nasional menghadapi tantangan yang sangat kompleks akibat arus globalisasi dan digitalisasi yang mengaburkan batas-batas teritorial (Castells, 2010). Masifnya pertukaran budaya global, hegemoni gaya hidup barat (*westernisasi*), dan dominasi platform digital transnasional berpotensi memicu krisis identitas, terutama di kalangan generasi muda. Ketika nilai-nilai lokal dianggap usang atau tertinggal dibandingkan dengan tren global, kohesi sosial yang selama ini mengikat negara-bangsa dapat melemah, memicu lahirnya fenomena alienasi budaya dan polarisasi sosial.

Tantangan tersebut semakin diperparah oleh bangkitnya politik identitas kontemporer yang mengeksploitasi sentimen partikularis berbasis etnisitas, agama, atau golongan demi kepentingan politik elektoral jangka pendek (Fukuyama, 2018). Ketika identitas kelompok minoritas atau mayoritas dipertentangkan secara tajam dalam ruang publik, fondasi identitas nasional yang bersifat inklusif akan mengalami keretakan. Fragmentasi sosial ini jika dibiarkan akan mengikis rasa saling percaya (*social*

trust) antarwarga negara dan melemahkan legitimasi institusi demokrasi yang menjadi pilar pengikat kesatuan politis.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, institusi pendidikan dan negara memegang tanggung jawab besar dalam merevitalisasi identitas nasional melalui kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual dan adaptif (Banks, 2008). Pembelajaran mengenai nilai-nilai kebangsaan tidak boleh lagi sekadar menjadi indoktrinasi tekstual yang kaku, melainkan harus bertransformasi menjadi ruang dialog kritis. Generasi muda perlu diajak untuk memahami sejarah bukan sebagai hafalan masa lalu, melainkan sebagai kompas moral untuk menganalisis dan memecahkan persoalan-persoalan kebangsaan di masa kini dan masa depan.

Selain lewat pendidikan, rekonstruksi identitas nasional di era digital juga membutuhkan strategi kebudayaan baru yang memanfaatkan teknologi informasi secara kreatif (Parekh, 2008). Negara dan komunitas sipil harus mampu memproduksi konten-konten budaya lokal yang berkualitas tinggi, inklusif, dan relevan dengan selera global agar mampu bersaing di ruang siber. Dengan mengemas kearifan lokal, seni tradisional, dan nilai-nilai luhur bangsa ke dalam media modern, identitas nasional dapat tetap eksis, relevan, serta menjadi kebanggaan kolektif di tengah pergaulan antarbangsa.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah sebuah proyek berkelanjutan (an ongoing project) yang tidak pernah benar-benar selesai dirumuskan (Hall, 1996). Ia adalah sebuah ruang dialektika tempat masa lalu yang historis bertemu dengan realitas masa kini yang plural dan dinamis. Keberhasilan suatu bangsa dalam mempertahankan eksistensinya sangat bergantung pada kemampuannya untuk merawat inti dari identitas kolektifnya, sekaligus tetap membuka diri secara adaptif terhadap perubahan global tanpa kehilangan jati diri aslinya.

Marxisme, sebagai buah teori yang dicetuskan oleh Karl Marx, berjalan pada materialism fundamental yang memandang bahwa struktur ekonomi (base) merupakan pokok utama dalam membangun polemic institusi politik (superstructure) dan kesadaran social. Dalam pandangan ini, historis manusia dipandang sebagai runtutan perjuangan kelas yang tidak bisa dihindari, dimana identitas individu dipahami sebagai sebuah “komunitas terbayang” (imagined community) yang mengikat individu melalui cerita sejarah, budaya, dan keinginan politik Bersama dalam lingkup multinegara dan bangsa (Anderson, 2006). Secara teori, Marxisme dan identitas nasional sering kali dikonotasikan sebagai hal yang kontradiksi; Marxisme bersifat internasionalis dan meromantisasi solidaritas lintas batas, sementara identitas nasional bersifat menguntungkan kepentingan kelompok tertentu, dan dibatasi dengan daerah dan kedaulatan absolut.

Identitas Nasional kerap kali dikatakan sebagai sesuatu yang suci, stabil dan mampu menembus batas-batas social. Dalam pembahasan awalnya, identitas nasional dicap sebagai “lem” yang merekatkan perbedaan primordial demi integrasi bangsa yang tercapai. Namun, jika dilihat melalui sejarahnya, identitas nasional tumbuh dari kondisi material dan hubungan kuasa yang kuat pada masanya (Marx & Engels, 1970). Anderson (2006) mengatakannya sebagai “komunitas terbayang”, namun aliran

marxisme mengkritiknya lebih jauh dengan mempermasalahkan pelaku dan kepentingan kelas yang membuat imajinasi tersebut.

Dalam dinamika kapitalisme multinasional, terjadi tergeseran antara batas-batas ideologi tradisional. Satu sisi negara berusaha untuk mempertahankan kedaulatannya; disisi lain, arus modal lintas batas menuntut adanya kesesuaian identitas demi kapital yang terakumulasi (Harvey, 2005). Disini lah letak perbedaannya. Identitas nasional sering kali difungsikan oleh pemerintahan untuk instrumen hegemoni untuk menciptakan peraturan dan Batasan yang masih kurang jelas (Gramsci, 1971). Dengan mengedepankan sisi patriotisme yang abstrak, perbedaan kelas-kelas yang nyata di dalam Masyarakat seringkali diredam bahkan dianggap sebagai sesuatu yang kriminal sehingga merusak stabilitas nasional.

Aliran Marxisme memandang fenomena ini sebagai kepalsuan kesadaran (*false consciousness*). Identitas nasional digunakan untuk menjadikan masyarakat memiliki pandangan yang kabur tentang kelas pekerja di suatu negara sebenarnya memiliki kepentingan material yang lebih dekat dengan pekerja di negara lain daripada dengan kelompok petinggi (*bourgeois*) dalam negaranya sendiri (Hobsbawm, 1990). Identitas menjadi batas yang memisahkan persatuan batas yang berbeda-beda dan melestarikan status quo struktur ekonomi yang eksploitatif. (Althusser, 1971) berpendapat juga bahwa identitas nasional disosialisasikan melalui “Aparatus Ideologi Negara” seperti media pendidikan dan kebudayaan untuk memastikan bahwa seluruh aspek tatanan masyarakat memiliki kepatuhan yang sempurna.

Namun, mengukur kembali identitas nasional bukan berarti harus dihilangkan secara menyeluruh. Penelitian ini memiliki kepentingan untuk membedah identitas nasional ini diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam struktural masyarakat. Kita perlu mempertanyakan kembali apakah identitas nasional saat ini adalah alat emansipasi terhadap kesetaraan sosial, atau hanya sebagai “topeng” petinggi untuk menutupi kepentingan oligarki yang berlandung dibawah nama kebudayaan dan kewarganegaraan (Wood, 2003). Melalui pandangan Marxis, Analisis ini memiliki tujuan untuk menemukan rumusan identitas yang memiliki pengaruh yang lebih baik dari singkapan keseluruhan ideologi.

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan fundamental dengan mengkaji kembali narasi identitas nasional sebagai entitas yang bersifat alamiah dan menetap. Spesifiknya, penelitian ini memiliki tujuan yakni menganalisis pengaruh struktur ekonomi (basis) terhadap pembentukan identitas nasional untuk mengidentifikasi adanya kepentingan kelas atas terhadap masyarakat dalam naungan kata “nasionalisme”, membangun lagi sekat-sekat ideologi yang membatasi adanya diskursus kebangsaan, dengan meninjau apakah identitas nasional hanya memiliki fungsi sebagai alat emansipasi rakyat atau berfungsi juga sebagai alat untuk mengibarkan dan melancarkan keputusan dan kekuasaan elit atas, serta untuk memaparkan kritik Marxis dalam pembahasan globalisasi terbaru untuk memberikan pemahaman bahwa identitas nasional memiliki nilai yang lebih inklusif.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang arti dari identitas nasional. Peneliti mampu

untuk membedah masalah kemanusiaan dan sosial melalui kacamata akademis dengan penggunaan metode ini. Sejalan dengan judulnya, paradigma yang dipakai adalah paradugma kritis yang menjadi pokok utama dalam teori Marxisme. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan kenyataan yang terjadi secara pasif, tapi berusaha untuk membongkar struktur kedaulatan dan kepentingan kelas yang berlandung dibalik narasi-narasi ideologis yang dominan diantara masyarakat.

Dapat dipastikan penelitian memiliki rujukan dari literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Teknis pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan mengklasifikasi, membedakan, dan mengkategorisasi materi luteratur menyesuaikan dengan tema-tema yang bersangkutan seperti aparatus ideologi, dan penyelewengan fungsi identitas itu sendiri.

Pembahasan

Pembahasan mengenai identitas nasional dalam skala kontempore seringkali terjebak dalam manisnya sejarah yang dangkal dan pengabaian terhadap realitas material yang mendasari hal tersebut. Secara ontologis, identitas nasional bukanlah sebuah makhluk yang turun dari langit dan hanya sekadar mutlak anugrah tuhan tanpa pembahasan dan pengkajian, melainkan sebuah alat pembangunan sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan modal produksi yang paling mencolok dan dominan dalam masyarakat homogen.

Melalui tinjauan kritik Marxis, identitas nasional dipahami sebagai bagian integral dari ideologis yang terstruktur untuk melanggengkan kekuasaan kelas penguasa atas kelas pekerja. Paradigma ini menimbulkan spekulasi tabir yang seolah-olah menyatukan elemen bangsa, tetapi pada hakikatnya adalah mengaburkan kontradiksi kelas yang tajam dibalik kata “persatuan” tersebut.

Ketika penulis membicarakan tentang upaya melampaui sekat ideologi, penulis sedang berhadapan dengan upaya pemerintah dalam meredakan potensi perlawanan dari kelas-kelas tertindas. Melalui ideologinya, negara mempromosikan identitas nasional sebagai satu-satunya identitas yang sah dan utama, sehingga identitas kelas dianggap sebagai ancaman stabilitas nasional. Pembangunan identitas bangsa yang seringkali bersifat abstrak dan tidak tertulis digunakan untuk mengatur masyarakat untuk mengikuti kepentingan suatu kelas dalam akumulasi modal, bahkan rakyat dipaksa untuk berkorban demi suatu alasan yang disebut sebagai “kepentingan nasional” yang sebenarnya adalah kepentingan golongan elit atas. Oleh karena itu, penulis melihat bagaimana dialektika materialisme mampu mengupas tuntas kajian identitas nasional di tengah arus globalisasi yang semakin meningkat pesat, sebagaimana ditekan hubungan antara ekonomi basis dan ideologi pembangunan suatu bangsa (Aripin & Salsabila, 2022).

Lebih jauh lagi, identitas nasional dalam kerangka kritik Marxisme juga berperan sebagai kesadaran palsu masyarakat yang mencegah kaum proletar menyadari kemampuan mereka dan objektivitas mereka dalam struktural produksi. Dengan menekankan kesadaran masyarakat bawah dalam kesamaan bahasa, budaya, serta

sejarah, sehingga negara mampu untuk menciptakan rasa memiliki antar sesama yang semu. Misalnya, jika buruh memiliki ikatan kewarganegaraan yang sama dengan majikannya, maka ia mungkin mampu merasa memiliki ikatan dalam kerja yang lebih kuat hanya karena kesamaan hal tersebut, dibandingkan dengan buruh di negara lain yang mengalami penindasan serupa.

Kritik Marxisme terhadap nasionalisme secara teoritis mampu membongkar bagaimana identitas nasional sengaja dikonstruksi menjaga status quo dan mencegah persatuan golongan kelas yang sifatnya transnasional (Fathani, 2021). Dalam perkembangannya, nasionalisme tidak lagi menjadi sentimen emosional, tapi telah berubah menjadi kepentingan politik yang mampu diolah dan diperjualbelikan. Simbol-simbol kebangsaan dan lantangan patriotisme dibuat dan direka-reka lalu disebarluaskan secara luas dalam media sosial masyarakat untuk menciptakan dukungan masyarakat dalam kebijakan-kebijakan kelas elit yang sebenarnya bersifat eksploitatif bukan menyejahterakan masyarakat luas.

Proses komodifikasi identitas ini menyatakan bahwa simbol-simbol negara saat ini telah diperuntukkan untuk pemahaman kapitalisme, dimana kepatuhan tatanan pasar global dapat menjadi tolak ukur dalam kesetiaan kepada bangsa (Surryono2024). Hegemoni budaya ini menjadikan masyarakat merasa tidak lagi ditindas secara halus secara halus, tapi mereka merasa sedang berpartisipasi dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Pendidikan dan institusi sosial lainnya juga dapat memiliki peran krusial dalam memperkuat struktur yang kuat ini. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan sering kali dibuat untuk menjadikan warga negara memiliki pemahaman yang patuh dan menerima tatanan sosial tanpa kritik yang mendalam dalam permasalahan ketimpangan ekonomi. Analisis terhadap materi pembelajaran kewarganegaraan mengungkapkan bagaimana negara menggunakan hal tersebut sebagai alat yang membentuk identitas nasional selaras dengan kepentingan stabilitas kebijakan dan keinginan kelas elit (Hidayat,2023)

Menakar ulang identitas nasional berarti mengharuskan kita untuk menggugat narasi persatuan yang sudah dianggap final. Persatuan yang dipaksa dan dibentuk atas fondasi ketimpangan kelas yang lebar hanya akan menghasilkan stabilitas yang rapuh dan mudah terpecah-belah. Identitas nasional harus dikembalikan pada substansi perjuangan rakyat untuk mendapatkan kembali kedaulatan atas alat-alat produksi dan sumber daya alam dan manusianya. Ekonomi politik identitas menjadi sangat awam untuk dipahami dan dipelajari untuk memahami bagaimana pembelajaran kebangsaan seringkali kontra dengan kenyataan hidup sehari-hari miskin kota dan petani yang terpinggirkan (Pratama, 2020). Identitas yang kuat seharusnya lahir dari kesejahteraan yang merata, bukan slogan kosong yang diucapkan oleh para elit.

Oleh karena itu, upaya melampaui sekat ideologi tidak boleh berarti meninggalkan perjuangan kelompok kelas. Sebaliknya, identitas nasional harus diisi dengan konten perjuangan yang memihak terhadap kesejahteraan dan kelayakan hidup masyarakat secara umum. Nasionalisme dalam tinjauan kritik Marxis adalah nasionalisme yang

bersifat emansipatoris, yang bertujuan untuk membebaskan dan menjauhkan rakyat dari perbudakan dan pengikutan yang buta.

Tanpa adanya keadilan material, identitas nasional hanyalah sebuah topeng dan tabir estetik nan indah untuk menutupi wajah buruk kemiskinan dan eksploitasi masyarakat, serta menutupi biang kerok kelas atas dalam mewujudkan kemauan dan keinginan mereka yang terlindung dari narasi nasionalisme dan kebangsaan. Menakar kembali identitas nasional adalah langkah awal bagi masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif yang jujur dan berakar terhadap kehidupan masyarakat secara umum dan mendalam, sehingga persatuan yang tulus dan semangat masyarakat dan pemerintah dalam pembebasan ekonomi dan sosial dapat terjalin dengan baik.

Kesimpulan dan Saran

Identitas nasional masih memainkan peran penting dalam menjaga persatuan dan keberlanjutan suatu bangsa, terutama di tengah globalisasi dan konflik ideologis yang semakin kompleks. Kritik Marxis tidak bertujuan untuk memberantas identitas nasional, tetapi lebih mendorong masyarakat untuk memahami bagaimana identitas nasional dibentuk, digunakan, dan diinterpretasikan dalam struktur sosial. Dengan demikian, identitas nasional idealnya harus dibangun secara inklusif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan kelas, agama, atau kelompok tertentu. Identitas nasional yang kuat tidak hanya tercermin dalam simbol-simbol negara, tetapi juga dalam penciptaan keadilan sosial, solidaritas, dan kesadaran kolektif untuk membangun bangsa yang lebih manusiawi.

Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengembangkan pemahaman yang lebih kritis dan kontekstual tentang identitas nasional sehingga masyarakat memahami nasionalisme tidak hanya secara formal tetapi juga memahami realitas sosial di sekitarnya. Pendidikan kewarganegaraan harus diarahkan untuk membangun kesadaran sosial, toleransi, dan kepedulian terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang masih ada di masyarakat. Lebih lanjut, dialog terbuka antara berbagai kelompok sosial diperlukan agar identitas nasional dapat berkembang secara dinamis dan tidak digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik tertentu.

Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengkaji identitas nasional dengan pendekatan yang lebih interdisipliner, seperti menghubungkan perspektif Marxis dengan studi budaya, agama, dan globalisasi. Penelitian semacam ini sangat penting untuk memahami perubahan identitas nasional di era digital dan kapitalisme global, yang terus memengaruhi pola pikir masyarakat modern. Dengan penelitian yang lebih mendalam, diharapkan identitas nasional dapat menjadi kekuatan pemersatu bagi bangsa, bukan hanya simbolis, tetapi juga mampu menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran bersama.

Daftar Pustaka

- Althusser, L. (1971). *Lenin and Philosophy and Other Essays*. Monthly Review Press.
- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Revised). Verso.

- Aripin, N., & Salsabila, S. (2022). Dialektika Materialisme dalam Mengkaji Identitas Nasional di Era Globalisasi. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.22146/jps.v9i1.72341>
- Banks, J. A. (2008). Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age. *Educational Researcher*, 37(3), 129–139. <https://doi.org/10.3102/0013189X08317501>
- Billig, M. (1995). *Banal Nationalism*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446216972>
- Castells, M. (2010). *The Power of Identity* (2nd Edition). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781444318234>
- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik: Membangun Keberlanjutan dan Kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Fathani, A. T. (2021). Kritik Marxisme terhadap Nasionalisme: Sebuah Tinjauan Teoretis atas Konstruksi Identitas Bangsa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(2), 112–127. <https://doi.org/10.22146/jsp.63412>
- Fukuyama, F. (2018). *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. Farrar, Straus and Giroux. <https://doi.org/10.1080/00396338.2018.1518382>
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Guibernau, M. (2007). *The Identity of Nations*. Polity Press. https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2009.00405_1.x
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press.
- Hobsbawm, E. J. (1990). *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality*. Cambridge University Press.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0198290918.001.0001>
- Marx, K., & Engels, F. (1970). *The German Ideology*. International Publishers.
- Pratama, I. G. (2020). Ekonomi Politik Identitas: Menggugat Narasi Persatuan di Tengah Ketimpangan Kelas. *Jurnal Kontemporer Politik*, 5(1), 30–44. <https://doi.org/10.20473/jkp.v5i1.20231>
- Smith, A. D. (1991). *National Identity*. Penguin Books. <https://doi.org/10.1017/S001215250002875X>
- Tharaba, M. F. (2019). Kajian Pemikiran Integrasi Keilmuan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Melalui Ulul Albab (pp. 126–142). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/7973/1/7973.pdf>
- Wood, E. M. (2003). *Empire of Capital*. Verso.
- Zainuddin, S. D. M., Sofiana, F., & Afwadzi, B. (2021). Kurikulum Pendidikan Islam di UIN Malang: Studi Pemikiran Imam Suprayogo dan M. Zainuddin. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 20(2), 248–272. <https://repository.uin-malang.ac.id/12394/>